

Pengembangan Masyarakat Islam Melalui Optimalisasi Ekonomi Pesantren: Kontribusi Nahdlatul Ulama di Ponpes Darul 'Ulum Sekampung, Lampung Timur

Ahmad Mukhlishin

Universitas Ma'arif Lampung Indonesia

E-mail: ahmadmukhlishin@umala.ac.id

ABSTRACT

Nahdlatul Ulama (NU), as the largest religious organization in Indonesia, plays a highly strategic role in the development of Islamic society, particularly through the optimization of Islamic boarding school (pesantren)-based economies. Currently, pesantren serve not only as institutions for education and religious transmission, but have also transformed into agents of social change and centers for community economic empowerment rooted in the principles of social justice, self-reliance, and togetherness. This article aims to thoroughly examine NU's contribution to promoting community independence and development through the pesantren ecosystem, focusing on a case study at Darul 'Ulum Islamic Boarding School in Sekampung, East Lampung. Using a descriptive qualitative approach, this study reveals that institutional contributions are realized through the optimization of empowerment programs, such as the establishment of pesantren cooperatives, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and the strengthening of the entrepreneurial ecosystem for students (santri) and the surrounding community. Overall, NU's role is multidimensional, encompassing education, socio-economic empowerment, and the strengthening of social cohesion, although in practice it still faces challenges related to managerial limitations, access to capital, and digital literacy.

Keywords: Islamic Community Development, Nahdlatul Ulama, Pesantren Economy, Darul 'Ulum Islamic Boarding School.

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan masyarakat Islam, khususnya melalui optimalisasi ekonomi yang berbasis pada pondok pesantren. Pesantren saat ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan transmisi keagamaan, tetapi telah bertransformasi menjadi agen perubahan sosial (agent of social change) dan pusat pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, kemandirian, dan kebersamaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kontribusi NU dalam mendorong kemandirian dan pengembangan masyarakat melalui ekosistem pesantren, dengan mengambil fokus studi kasus di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sekampung, Lampung Timur. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kontribusi kelembagaan diwujudkan dalam optimalisasi program pemberdayaan seperti pembentukan koperasi pesantren, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta penguatan ekosistem kewirausahaan santri dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, peran NU bersifat multidimensi, mencakup edukasi, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan penguatan kohesi sosial, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan manajerial, akses permodalan, dan literasi digital.

Kata Kunci: Pengembangan Masyarakat Islam, Nahdlatul Ulama, Ekonomi Pesantren, Ponpes Darul 'Ulum..

A. PENDAHULUAN

Sejak didirikan pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) telah meletakkan paradigma fundamental bahwa perjuangan keagamaan harus berjalan beriringan dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. NU tidak memosisikan dirinya secara eksklusif pada urusan ubudiyah (ritual) semata, melainkan mengintegrasikan dimensi sosial-ekonomi ke dalam gerakan keagamaannya. Jejak historis mencatat bahwa embrio lahirnya NU bahkan didahului oleh pergerakan pemberdayaan ekonomi bernama *Nahdlatul Tujjar* (Kebangkitan Saudagar) pada tahun 1918. Fakta ini membuktikan bahwa visi kemandirian ekonomi, kewirausahaan, dan penguatan taraf hidup masyarakat kelas bawah telah menjadi fondasi atau DNA dari organisasi ini jauh sebelum diresmikan secara formal (Fealy & Barton, 1996).

Dalam kacamata keilmuan kontemporer, pergerakan yang dilakukan NU tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik Pengembangan Masyarakat Islam (*Islamic Community Development*). Paradigma ini didasari oleh kesadaran sosiologis bahwa stabilitas ekonomi kerakyatan adalah pilar krusial dalam meminimalisasi kesenjangan dan menjaga harmoni

sosial di tingkat akar rumput. Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai problem materi, tetapi juga ancaman terhadap kualitas keimanan dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan dorongan terhadap produktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang manifestasinya harus dikawal secara terstruktur oleh lembaga-lembaga di bawah naungan NU.

Untuk mengejawantahkan visi besar pengembangan masyarakat tersebut, pondok pesantren hadir sebagai basis kultural sekaligus institusi tradisional yang memiliki daya ungkit paling masif. Pesantren kini tidak lagi dipandang secara sempit sebagai asrama terisolasi tempat para santri mengkaji kitab kuning, melainkan telah berevolusi menjadi lokomotif kemandirian desa. Lembaga pendidikan ini memiliki modal sosial yang luar biasa, mulai dari kepatuhan terhadap figur kyai sebagai *opinion leader*, soliditas para santri, hingga loyalitas jamaah yang secara kolektif mampu membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Konteks pergeseran peran pesantren ini sangat relevan untuk dilihat di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sebuah kawasan dengan corak masyarakat agraris dan religius. Di wilayah ini, pesantren menjadi episentrum pergerakan massa dan pusat rujukan dalam berbagai aspek kehidupan warga pedesaan. Transformasi sosial di tingkat lokal sangat bergantung pada bagaimana institusi-institusi keagamaan mampu merespons dinamika zaman. Oleh karenanya, pesantren dituntut untuk keluar dari zona nyaman pendidikan klasik dan mulai merancang program-program yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian warga di sekelilingnya.

Representasi dari tuntutan strategis ini dapat diamati secara langsung di Pondok Pesantren Darul 'Ulum, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Sebagai salah satu institusi pendidikan keagamaan yang berafiliasi kuat dengan kultur NU, Ponpes Darul 'Ulum mengemban amanah institusional dan moral untuk mengoptimalkan seluruh potensinya guna menstimulasi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk membedah bagaimana implementasi dan kontribusi NU dalam mengorkestrasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pesantren di Ponpes Darul 'Ulum, serta menganalisis capaian dan tantangan yang menyertainya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif untuk membedah fenomena pemberdayaan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data difokuskan pada studi literatur serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen konseptual dan rekam jejak praktik empiris gerakan sosial-ekonomi NU, khususnya yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sekampung, Lampung Timur. Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan mereduksi temuan-temuan lapangan yang kompleks, menyajikannya dalam kerangka naratif yang logis, dan menarik kesimpulan konklusif yang relevan dengan ranah keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam.

Secara teoretis, analisis dalam penelitian ini berpijak pada teori Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) yang meletakkan manusia sebagai subjek utama pembangunan. Menurut Zubaedi (2013), indikator utama keberhasilan pengembangan masyarakat adalah adanya partisipasi aktif, peningkatan kapasitas SDM (*capacity building*), dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Dalam konteks ini, program ekonomi yang dijalankan tidak boleh bersifat filantropis yang menciptakan ketergantungan (seperti sekadar

membagikan sedekah), melainkan harus bersifat emansipatoris, yakni memberdayakan masyarakat agar mampu memproduksi kekayaannya sendiri dan keluar dari jerat struktural kemiskinan.

Sebagai pisau bedah sosiologis, kajian ini juga mengadopsi pendekatan teori Modal Sosial (*Social Capital*) yang secara inheren melekat pada tradisi pesantren. Wahid (2001) menjelaskan bahwa pesantren memiliki struktur ikatan komunal yang direpresentasikan melalui kepatuhan terhadap kyai, solidaritas antar-santri, dan kepercayaan (*trust*) dari warga sekitar. Modal sosial inilah yang bertindak sebagai perekat atau instrumen yang sangat ampuh untuk menggerakkan partisipasi ekonomi massa. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pesantren membuat biaya transaksi ekonomi menjadi lebih rendah dan meminimalisasi risiko sengketa dalam kerja sama bisnis di akar rumput.

Lebih jauh, landasan filosofis dari setiap program yang dianalisis dikawal oleh teori Ekonomi Islam. Kerangka pemikiran ini menempatkan keadilan dalam distribusi kekayaan, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), dan orientasi keberkahan (*falah*) sebagai tujuan utama (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014). Model ekonomi ini selaras dengan spirit ekonomi kerakyatan Indonesia yang menolak secara tegas sistem kapitalisme eksploitatif, dan lebih memilih jalan gotong royong untuk memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan eksplorasi lapangan dan analisis dokumen, Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sekampung telah menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan visi pengembangan masyarakat Islam ala Nahdlatul Ulama. Pesantren ini secara bertahap memetakan potensi sumber daya internal dan eksternal untuk kemudian diramu menjadi serangkaian program ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan internal institusi, tetapi juga didesain agar memiliki efek rembesan (*trickle-down effect*) bagi kesejahteraan warga di sekitar pesantren.

Implementasi paling fundamental dari gerakan ekonomi pesantren ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan berupa pendirian Koperasi Pesantren (Kopontren). Kopontren ini bertindak sebagai soko guru perekonomian di tingkat mikro, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi ribuan santri sekaligus membuka akses pasar bagi warga sekitar. Keberadaan koperasi ini menjadi sarana edukasi praktis bagi para pengurus dan santri mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, transparansi, dan tata kelola unit usaha milik bersama yang berasaskan keadilan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai bentuk perlindungan dan advokasi sosial, inisiatif kelembagaan tersebut diperluas dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah sejenis Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Instrumen keuangan ini merupakan respons taktis pesantren dalam membendung masifnya praktik rentenir yang kerap mencekik para petani dan pedagang kecil di kawasan Sekampung. Dengan skema pembiayaan tanpa bunga eksploitatif (riba), BMT berhasil menyediakan akses permodalan yang murah dan aman, sekaligus menjadi jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat desa.

Selain bergerak di sektor finansial, pesantren juga merambah masuk ke sektor riil dengan memaksimalkan potensi agraris lokal. Pihak pesantren memanfaatkan lahan-lahan

kosong di sekitar lembaga untuk dikembangkan menjadi area pertanian produktif. Dalam pelaksanaannya, pesantren tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng masyarakat lokal sebagai mitra kerja atau penggarap lahan. Skema kemitraan (*muzara'ah/mukhabarah*) ini tidak hanya menjamin ketahanan pangan bagi asrama santri, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal sehingga roda ekonomi desa terus berputar.

Pengembangan sektor riil juga menyentuh ranah peternakan, yang didesain dengan konsep pemberdayaan berbasis komunitas. Pesantren menginisiasi program pembesaran hewan ternak (seperti unggas dan kambing) yang teknis pemeliharaannya dapat dikerjasamakan dengan wali santri maupun warga setempat. Program ini menerapkan sistem bagi hasil yang adil, sehingga mampu memberikan porsi pendapatan tambahan (*income generating*) bagi keluarga-keluarga di sekitar lingkungan Ponpes Darul 'Ulum.

Di sisi lain, pesantren juga memainkan peran penting sebagai agregator bagi ekosistem produk halal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pesantren secara aktif memfasilitasi penyerapan produk-produk makanan ringan, hasil bumi, dan kerajinan masyarakat untuk dipasarkan melalui unit-unit usaha pesantren. Integrasi ini memberikan kepastian pasar (*captive market*) bagi pelaku UMKM di Sekampung, sekaligus mensyiarkan pentingnya mengonsumsi produk lokal yang terjamin kehalalannya sesuai dengan prinsip syariah.

Lebih mendalam lagi, intervensi pesantren juga ditujukan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program inkubasi kewirausahaan santri. Santri diberikan pelatihan kecakapan hidup (*life skills*) mulai dari pengolahan makanan, keterampilan teknologi dasar, hingga manajemen bisnis sederhana. Tujuannya sangat jelas, yakni mencetak lulusan yang tidak hanya mumpuni berdakwah di mimbar, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan sosial (*social entrepreneurs*) yang mandiri ketika mereka kembali terjun ke tengah-tengah masyarakat luas.

Keberhasilan seluruh program di atas tidak terlepas dari pemanfaatan modal sosial jaringan yang mengikat kultural warga Nahdliyin. Pesantren memberdayakan ikatan emosional dari jejaring alumni dan anggota jamaah pengajian majelis taklim di sekitar Sekampung untuk membentuk rantai pasok pemasaran yang kuat. Jaringan ini bertindak secara militan sebagai distributor sekaligus konsumen loyal (*end user*) terhadap berbagai produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha pesantren.

Secara kumulatif, berbagai program integratif yang dijalankan oleh Ponpes Darul 'Ulum Sekampung membuktikan bahwa gagasan ekonomi kerakyatan bukanlah sekadar utopia. Dari Kopontren, BMT, kemitraan agraris, hingga inkubasi wirausaha santri, semuanya merupakan serangkaian manifestasi dari kontribusi riil Nahdlatul Ulama dalam menerjemahkan konsepsi kemandirian dan Pengembangan Masyarakat Islam secara empiris dan kontekstual di akar rumput.

Menelaah capaian yang dipaparkan dalam hasil penelitian, terlihat jelas bahwa model pengembangan ekonomi di Ponpes Darul 'Ulum sangat selaras dengan prinsip-prinsip ideal Pengembangan Masyarakat Islam. Program-program yang diimplementasikan (seperti koperasi, pertanian partisipatif, dan BMT) mengonfirmasi bahwa unit usaha pesantren bukanlah entitas kapitalis murni yang bertujuan mengeruk profit setinggi-tingginya. Sebaliknya, hal ini merupakan manifestasi dari ekonomi kerakyatan yang menjadikan kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, dan penanggulangan kemiskinan sebagai indikator utama kesuksesannya, sebagaimana ditegaskan oleh Mubyarto (2002).

Analisis dari sudut pandang Modal Sosial menunjukkan betapa berharganya ikatan kultural dalam sistem ekonomi pesantren. Kepatuhan kepada Kyai dan ikatan persaudaraan warga Nahdliyin berhasil dikonversi menjadi instrumen "penghematan biaya transaksi". Masyarakat pedesaan tidak memerlukan kontrak hukum yang rumit atau biaya pemasaran yang mahal untuk bertransaksi dengan institusi pesantren; modal utamanya adalah tingkat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan tesis bahwa agama (dalam bentuk tradisi dan kelembagaan) dapat menjadi basis yang sangat kuat untuk menggerakkan dinamika perekonomian suatu wilayah (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

Namun demikian, kajian ini juga menemukan tantangan struktural yang menjadi batu sandungan bagi akselerasi dan kesinambungan pengembangan masyarakat di pesantren tersebut. Kelemahan paling mendasar bermuara pada sistem tata kelola (manajerial) yang belum beranjak ke arah profesional. Operasional roda bisnis pesantren sering kali tumpang tindih dengan urusan administratif institusi dan masih sangat bergantung pada satu atau dua figur karismatik. Jika sistem tidak segera dilembagakan secara modern dan independen, maka skala usaha akan stagnan dan rentan mengalami kemunduran apabila terjadi regenerasi kepemimpinan di dalam pesantren.

Tantangan kedua berada pada dimensi finansial dan adopsi teknologi. Keterbatasan akses terhadap permodalan makro dari lembaga keuangan formal membuat unit usaha pesantren sulit melakukan eskalasi bisnis untuk membangun industri padat karya. Di saat yang bersamaan, rendahnya literasi digital di kalangan pengelola pesantren mengakibatkan lambatnya adaptasi terhadap perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan teknologi finansial (*fintech*). Akibatnya, pangsa pasar produk pesantren menjadi sempit, hanya berkutat pada jamaah lokal, dan gagal meraih peluang ekspansi ke pasar regional maupun nasional.

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan langkah intervensi yang bersifat komprehensif dari stakeholder terkait. Rekomendasi strategis yang dapat dirumuskan meliputi kewajiban untuk melakukan program *capacity building* di bidang manajemen keuangan bagi para santri pengurus, percepatan literasi digitalisasi usaha, dan pembukaan ruang kemitraan kolaboratif. NU secara kelembagaan, pemerintah daerah Lampung Timur, serta sektor swasta (BUMN/Perbankan) harus bersinergi untuk membina dan menyuntikkan dukungan teknis agar kemandirian ekonomi pesantren ini bersifat berkelanjutan (*sustainable*).

D. PENUTUP

Nahdlatul Ulama secara nyata telah membuktikan kontribusinya yang esensial dalam agenda Pengembangan Masyarakat Islam melalui optimalisasi ekonomi berbasis pondok pesantren. Melalui implementasi di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Sekampung, Lampung Timur, terbukti bahwa institusi pendidikan tradisional mampu bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Melalui pengembangan instrumen Koperasi, BMT, dan integrasi rantai pasok produk lokal, pesantren berhasil memosisikan dirinya sebagai agen perubahan sosial yang merajut kemandirian warganya. Akan tetapi, pencapaian ini masih membutuhkan evaluasi strategis. Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan intervensi khusus berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen profesional, penguatan literasi digital, serta pembukaan ruang sinergi yang lebih luas dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta.

E. ACKNOWLEDGEMENT

Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung yang telah berkontribusi sarana dan prasarana dalam penyelesaian penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar" 09, no. 02 (2008): 10.
- Anika, Farida. "Menanamkan Kesadaran Multikultural: Belajar Menghapus Prasangka Di SMA Don Bonco Padang." *Panamas*, no. 1 (2008).
- Chalil, Ahmad. *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Koentjaningrat. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mukhlishin, A., & Suhendri, A. (2017). Aplikasi teori sosiologi dalam pengembangan masyarakat Islam. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(2), 211-234.
- Mukhlishin, A., Suhendri, A., & Dimyati, M. (2018). Metode penetapan hukum dalam berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 167-184.
- Fealy, G., & Barton, G. (1996). *Nahdlatul Ulama, traditional Islam and modernity in Indonesia*. Monash Asia Institute.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani Press.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi kerakyatan dalam era globalisasi*. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) Universitas Gadjah Mada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2014). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan tradisi: Esai-esai pesantren*. LKiS.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Warisno, Andi. "Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi," n.d.
- Yuliani, Sri. *Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Mandar Dan Masyarakat Bugis Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.
- Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.